

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Persetujuan Renville antara Republik Indonesia dengan Belanda yang disepakati pada 17 Januari 1948, yang salah satu isinya yaitu pasukan Republik yang berada di “daerah kantong” harus ditarik ke daerah Republik Indonesia, sangat merugikan pihak bangsa Indonesia. Daerah kantong adalah daerah yang berada di belakang “garis Van Mook”, yakni garis yang menghubungkan dua daerah terdepan yang diduduki Belanda. Adapun penarikan mundur militer RI, khusus di Jawa Barat, tidak dilakukan sepenuhnya oleh Divisi Siliwangi. Beberapa eselon ditinggalkan untuk terus melakukan perang gerilya di daerah Jawa Barat (Nasution, 1995: 224-225).

Sementara itu, isi Persetujuan Renville tersebut ditolak oleh S.M Kartosuwiryo. Bersama dengan pasukannya yang terdiri dari Hizbullah dan Sabilillah sebanyak 4.000 orang, diputuskan untuk tetap tinggal di Jawa Barat, hal ini dilakukan sebagai wujud penolakan S.M.Kartosuwiryo terhadap isi Persetujuan Renville (Poesponegoro dan Notosusanto, 1993: 266).

Peristiwa penarikan mundur militer tentara Divisi Siliwangi oleh RI ke Jawa Tengah, ditambah dengan pendirian Negara Pasundan di Jawa Barat oleh Belanda, dipandang oleh Kartosuwiryo sebagai momen yang tepat untuk mewujudkan ambisinya yaitu mendirikan Darul Islam

Gagasan atau ambisi untuk mendirikan Darul Islam ataupun Negara Islam Indonesia ini telah dicanangkan oleh Kartosuwiryo pada tahun 1940-an, yang perkembangan selanjutnya dibentuk angkatan perang yang diberi nama Tentara Islam Indonesia (TII). Secara umum gerakan yang di prakarsai oleh Kartosuwiryo ini dikenal dengan nama Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII).

Gerakan DI/TII ini, pada awalnya hanya meliputi kawasan Jawa Barat, namun beberapa waktu kemudian gerakan ini diikuti jejaknya oleh beberapa pihak di kawasan lain, seperti Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan pada tanggal 7 Agustus 1953, serta T.M. Daud Beureueh di Aceh pada tanggal 20 Agustus 1953 (Subhan, 1999: 22-23).

Adapun gerakan DI/TII di Jawa Barat tersebar diberbagai wilayah misalnya Tasikmalaya, Garut, Majalaya, Bandung dan sebagainya. Khusus di Kota Garut, gerakan DI/TII, Kunto Sofianto dalam bukunya menerangkan bahwa:

Gangguan terhadap kehidupan masyarakat kota Garut setelah pendudukan Tentara Belanda, yakni aksi gerombolan DI/TII Kartosuwiryo yang berlangsung selama 13 tahun (1949-1962). Akibat gangguan ini para penduduk dari luar kota Garut, seperti Limbangan, Malangbong, Cikajang, dan sebagainya, banyak yang mengungsi ke kota Garut untuk meminta perlindungan dari Pemerintah RI. Akibat serangan gerombolan DI/TII, tentu saja sangat mengganggu kehidupan sosial masyarakat. Memang gerombolan DI/TII tidak berani memasuki kota Garut, karena dijaga oleh tentara Republik, namun di daerah pinggiran kota Garut, seperti di Sukadana, Muara Sanding, Sukaregang, Tarogong dan sebagainya sering mendapat gangguan (Sofianto, 2001: 108).

Yang menarik dari pergerakan DI/TII di daerah Garut yaitu terjadi konflik antara Darul Islam yang dipimpin oleh Kartosuwiryo dengan Darussalam yang dipimpin oleh K.H Yusuf Tadjiri di daerah Wanaraja Garut. Padahal kedua pemimpin ini di periode tahun 1940-1947 merupakan dua tokoh yang selalu

beriringan dalam satu organisasi (PSII, KPK PSII dan Masyumi), ataupun dalam usaha melakukan perlawanan terhadap Belanda yang tergabung dalam Markas Daerah Pertahanan Priangan (MDPP).

Pada tahun 1940-an Kartosuwiryo dan Yusuf Tadjiri merupakan orang-orang yang dipecat dari Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Pemecatan mereka terjadi karena perbedaan keyakinan haluan politik partai antara Abikoesno sebagai pimpinan PSII, menginginkan adanya perubahan haluan politik partai dengan bergabung dengan GAPI (Gabungan Politik Islam), sedangkan Kartosuwiryo dan kawan-kawan (Yusuf Tadjiri dan Kamran) tanpa kompromi tetap pada haluan politik partai yang dahulu yaitu Politik Hijrah. Pemecatan ini terkait pula dengan Kartosuwiryo tertuduh sebagai orang yang telah menyalahgunakan uang partai. Sebelum pemecatan itu Kartosuwiryo dengan anggotanya yang se-aliran antara lain Yusuf Tadjiri, dan Kamran membentuk partai baru yaitu Komite Pertahanan Kebenaran PSII (KPK PSII), yang dimaksudkan untuk bergerak di dalam PSII pimpinan Abikoesno (Al Chaedar, 1999).

Pada bulan Maret tahun 1940, KPK PSII berdiri secara independen yang berpusat di Malangbong, di sana pula didirikan Institut Suffah yaitu suatu lembaga pendidikan kader. Adapun Kartosuwiryo sendiri mengajar bahasa Belanda, Astrologi dan ilmu Tauhid, dan Yusuf Tadjiri sebagai salah satu mentor (pengajar) dalam institut tersebut (Awwas, 1999: 53).

Pada tahun 1945, tepatnya pada tanggal 15 September Kartosuwiryo dan Yusuf Tadjiri tergabung dalam sebuah organisasi bentukan Kartosuwiryo yaitu Markas Daerah Pertahanan Priangan (MDPP) yang berpusat di Bandung. Dengan

anggota salah satunya laskar Sabilillah di bawah pimpinan politikus Masyumi di antaranya Isa Anshari, Ajengan Toha Arsjad dan termasuk Yusuf Tadjiri (Dengel, 1995: 56).

Keikutsertaan Yusuf Tadjiri dalam pergerakan Kartosuwiryo ditahun-tahun berikutnya dirasakan kurang, buktinya pada tanggal 10 Februari 1948 telah berkumpul 160 wakil-wakil Islam di Pangwedusan Distrik Cisayong untuk mengadakan konferensi yang akan menuntut supaya pemerintah RI membatalkan Persetujuan Renville, yang hadir di antaranya Kamran sebagai komandan teritorial Sabilillah (yang dulu dipecat sama-sama dengan Kartosuwiryo dan Yusuf Tadjiri dari PSII), Sanusi Partawidjaja sebagai ketua Masyumi Daerah Priangan, Raden Oni sebagai pimpinan Sabilillah Daerah Priangan, Dahlan Lukman sebagai ketua GPII, Siti Murtadji'ah sebagai ketua Poetri GPII dan Abdullah Ridwan sebagai ketua Hizbullah untuk Priangan, Saefullah ketua Masyumi cabang Garut (Al Chaedar, 1999). Adapun Yusuf Tadjiri tidak hadir dalam konferensi tersebut. Dari ketidakhadiran Yusuf Tadjiri ini, memperlihatkan ada perbedaan pandangan antara Kartosuwiryo dengan Yusuf Tadjiri mengenai Persetujuan Renville yang telah dilakukan oleh pemerintah RI dengan Belanda.

Yusuf Tadjiri merupakan politikus Masyumi bersama dengan Isa Anshari dan Ajengan Toha Arsjad, namun pada konferensi Cisayong ini Yusuf Tadjiri tidak hadir, padahal salah satu keputusan terpenting diambil adalah membekukan Masyumi dan membentuk Pemerintahan Daerah Dasar di Jawa Barat dan mendirikan Tentara Islam Indonesia.

Sementara itu, pada tahun 1948 yaitu selama peristiwa Hijrah tentara Divisi Siliwangi ke daerah Republik yaitu Jawa Tengah, Yusuf Taujiri memimpin pasukan gerilya yang bernama pasukan Darussalam yang berkedudukan di daerah Wanaraja Garut. Pasukan ini salah satu dari berbagai pasukan yang sengaja ditinggalkan untuk terus melakukan perang gerilya di daerah Jawa Barat.

Di lain pihak Kartosuwiryo selama peristiwa Hijrahnya tentara Divisi Siliwangi, memanfaatkan keadaan dengan membentuk suatu pergerakan yang dinamakan DI/TII, pada awal pergerakan pihak DI mengajak beberapa pesantren untuk bergabung contohnya Pesantren Nagrak, Bakanceuri dan pondok Pesantren Cibuyut di daerah Limbangan serta pesantren-pesantren di daerah lainnya. Dalam Skripsinya Helmi Muhaemin (2005: 45) diterangkan bahwa:

Ketertarikan gerakan tersebut untuk mengajak Pesantren Cibuyut, Nagrak serta Bakanceuri untuk bergabung dengan mereka sebab lembaga pesantren di Desa Sukaratu merupakan lembaga yang tidak terikat oleh pemerintah RI dengan kemandirian fungsinya sebagai lembaga pendidikan agama yang dibangun secara swadaya oleh penduduk Desa Sukaratu, bukan oleh pemerintah. Gerakan DI/TII selalu melakukan pendekatan terhadap Kiai atau Ustadz di Pesantren Cibuyut, Nagrak atau Bakanceuri dengan mempertimbangkan kepemimpinan mereka yaitu memiliki banyak santri dan pengaruhnya pada penduduk Desa Sukaratu supaya mereka mau mendukung dan bergabung dalam gerakan tersebut.

Pesantren Cipari yang dipimpin oleh Yusuf Taujiri, tidak luput dari ajakan dari pihak DI untuk ikut serta bergabung dan memproklamkan Negara Islam Indonesia (NII). Namun berbeda dengan pesantren-pesantren lainnya, pesantren yang dipimpin oleh Yusuf Taujiri ini menolak untuk bergabung dengan DI. Dari penolakan ini memperjelas adanya perbedaan pandangan atau haluan politik dari Yusuf Taujiri yang lebih berpihak kepada pemerintah RI, daripada berpihak

kepada DI/TII, yang notabene berpayung Islam dan memperjuangkan berdirinya Negara Islam.

Konflik antara Kartosuwiryo (Darul Islam) dan Ajengan Yusuf Tadjiri (Darussalam), didasari oleh perbedaan pandangan politik, kemudian berlanjut kepada perbedaan sikap politik mereka masing-masing, dan pada akhirnya konflik kedua pihak ini berujung kepada timbulnya konflik fisik. Adapun payung Islam yang dipegang oleh kedua belah pihak, serta kedekatan mereka di waktu dulu tidak bisa menjadi bahan pertimbangan untuk bisa meredam konflik yang muncul di antara kedua belah pihak itu sendiri.

Konflik antara Kartosuwiryo dengan Yusuf Tadjiri yang masing-masing memimpin suatu pasukan bersenjata, menurut Ahmad Suhelmi merupakan konflik internal DI. Lebih lanjut dijelaskan dalam bukunya bahwa:

Konflik politik rupanya tidak terjadi antara mereka yang berbeda organisasi namun juga seorganisasi. Ini misalnya tampak dalam Darul Islam sendiri seperti yang terjadi antara Kartosuwiryo dengan K.H Yusuf Tadjiri. Di masa awal gerakan, K.H Yusuf Tadjiri adalah pendukung setia Darul Islam, namun dalam fase selanjutnya ia memisahkan diri dan berpihak ke tentara Republik. Para “tentara perlawanan” itu, termasuk K.H Yusuf Tadjiri berpihak kepada Republik Indonesia antara lain karena perbedaan ideologis (Suhelmi, 2001: 25).

Adapun konflik antara Darul Islam dengan Darussalam yang berujung kepada timbulnya konflik fisik, Bapak Saep Darmawan bin Yusuf Tadjiri (Hasil wawancara, tanggal 12 Nopember 2006) mengatakan bahwa “[.] terjadi sampai kurang lebih 46 kali penyerangan oleh pihak Darul Islam terhadap Darussalam. Awal penyerangan terjadi pada awal tahun 1949-nan dan yang terbesar pada tanggal 5 Agustus 1952”.

Menurut Saep Darmawan bin Yusuf Taujiri (Hasil wawancara, pada tanggal 12 dan 21 Nopember 2006) bahwa “[...] penyerangan yang dilakukan oleh DI tersebut dilatarbelakangi oleh penolakan dari Yusuf Taujiri untuk bergabung dengan DI pada tanggal 5 Agustus 1948, dari pihak DI yang diwakili oleh Sanusi Partawidjaja, Djadja Sudja’i, Enok dan lain-lain, mengajak kepada Yusuf Taujiri untuk bergabung dengan Darul Islam dan keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ditambah K.H Yusuf Taujiri menafikan ultimatum S.M. Kartosuwiryo pada tanggal 27 Januari 1949, agar Darussalam dapat menentukan sikap apakah berdiri di pihak DI atau RI. Ekses dari penolakan-penolakan dari Yusuf Taujiri ini terjadilah penyerangan-penyerangan oleh pihak DI kepada basis pasukan Darussalam di Pesantren Cipari dan juga terhadap semua orang yang terkait dengan Darussalam dan Pesantren Cipari (Yusuf Taujiri)”.

Ternyata ajakan terhadap Yusuf Taujiri untuk bergabung dengan DI dan memproklamkan sebuah Negara Islam, sebelum tahun 1948 oleh pihak DI pun telah dilakukan, dalam Holk H. Dengel (1995: 95) menerangkan bahwa ‘Kartosuwiryo mendesak Yusuf Taujiri pada bulan Agustus 1945 untuk bersama-sama memproklamkan sebuah negara Islam’.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji secara mendalam mengenai masalah pertentangan Darul Islam dengan Darussalam dalam sebuah judul: **“GERAKAN DARUL ISLAM/TENTARA ISLAM INDONESIA DI KECAMATAN WANARAJA GARUT TAHUN 1948-1962 (Konflik antara Darul Islam dengan Darussalam)”**.

Judul di atas, diambil karena ketertarikan penulis untuk mendokumentasikan ingatan-ingatan masyarakat yang mengetahui peristiwa sejarah gerakan DI/TII, khususnya mengenai dinamika konflik yang terjadi antara Darul Islam dengan Darussalam di daerah Wanaraja selama kurun waktu 1948-1962.

Ketertarikan lain yaitu kajian mengenai pertentangan antara Darul Islam dan Darussalam di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), khususnya di Jurusan Pendidikan Sejarah belum ada yang mengkaji tema tersebut, dan menurut penulis kajian-kajian studi literatur yang telah ada sebelumnya, yang mengkaji secara spesifik mengenai tema tersebut sangat kurang.

Adapun pemilihan tempat penelitian di Wanaraja, karena pada masa Hijrah tentara Divisi Siliwangi ke Jawa Tengah, Wanaraja merupakan basis dari beberapa pasukan yang sengaja ditinggalkan untuk terus melakukan perang gerilya melawan Belanda. Adapun pasukan yang berbasis di daerah Wanaraja yaitu pasukan Pangeran Papak pimpinan Jumhana dan Abubakar, pasukan Kalipaksi pimpinan Enok dan pasukan Darussalam pimpinan Yusuf Taujiri. Daerah ini juga cukup dekat dengan basis DI/TII sendiri, yang berada di Malangbong Garut.

Adapun pemilihan periode atau kurun waktu yang diambil peneliti adalah tahun 1948-1962, dengan rentang waktu 14 tahun tersebut diharapkan bisa menggambarkan secara utuh mengenai peristiwa tersebut. Periode tahun 1948 merupakan awal konflik antara Darul Islam dengan Darussalam, dan tahun 1962 merupakan akhir dari pergerakan Darul Islam sendiri, baik secara nasional maupun lokal khususnya di daerah Wanaraja Garut. Namun dengan batasan

periode tahun 1948-1962 ini tidak menghilangkan kajian konflik politik/ideologi yang terjadi sebelum tahun 1948-an yang memicu timbulnya konflik fisik antara Darul Islam dengan Darussalam.

1.2 Perumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemikiran di atas, maka penulis merumuskan masalah utama yang akan dikaji lebih mendalam dalam skripsi ini adalah “Bagaimana terjadinya konflik antara Darul Islam dengan Darussalam ?”.

Untuk lebih memfokuskan kajian penelitian ini, maka penulis membatasinya dalam beberapa pertanyaan penelitian, antara lain:

1. Apa yang menjadi latar belakang pertikaian antara Darul Islam dengan Darussalam itu sendiri ?
2. Bagaimana perbedaan pandangan politik antara Kartosuwiryo dengan Yusuf Taujiri ?
3. Bagaimana jalannya peristiwa pertikaian antara Darul Islam dengan Darussalam selama kurun waktu 1948-1962 ?

1.3 Tujuan Penulisan

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendapat kejelasan mengenai Gerakan DI/TII di Kecamatan Wanaraja Garut tahun 1948-1962, terutama mengenai konflik yang terjadi antara Darul Islam dengan Darussalam. Adapun secara khusus skripsi ini bertujuan antara lain mendokumentasikan memori penduduk terhadap peristiwa

sejarah mengenai konflik Darul Islam dengan Darussalam di Wanaraja yang terkait dengan:

1. Gambaran latar belakang munculnya konflik antara Darul Islam dengan Darussalam, yang didalamnya terkait pula lahir dan perkembangan kedua kelompok tersebut periode 1948-1962, kemudian situasi kondisi sosial-politik, pendidikan dan agama masyarakat Wanaraja sendiri, serta motif-motif yang mendorong terjadinya pertikaian.
2. Kejelasan perbedaan pandangan politik antara Kartosuwiryo dengan Yusuf Taujiri, antara lain pandangan mengenai Persetujuan Renville dan Pendirian Negara Islam, ditambah pula mengenai profil hidup dari kedua tokoh tersebut mulai dari latarbelakang keluarga, pendidikan, agama, sosial dan politik.
3. Gambaran mengenai jalannya peristiwa konflik itu sendiri selama kurun waktu 1948-1962.

Dari itu semua penulis berharap bisa merekonstruksi kembali peristiwa sejarah lokal tersebut melalui metode sejarah lisan, ditambah dengan kajian literatur, yang pada akhirnya penulis dapat menuangkan peristiwa tersebut ke dalam penulisan karya ilmiah/skripsi.

1.4 Metode dan Teknik Penelitian

1.4.1 Metode Penelitian

Untuk mengkaji masalah yang dibahas, penulis menggunakan metode historis yang digunakan untuk menggambarkan apa-apa yang telah terjadi pada

masa lampau. Menurut Nugroho Notosusanto, dalam E. Kosim (1984: 32) metode sejarah didefinisikan sebagai prosedur daripada kerja sejarawan untuk menuliskan kisah masa lampau berdasarkan jejak-jejak yang ditinggalkan oleh masa lampau. Sementara itu metode sejarah menurut Louis Gottschalk (1986: 32) adalah proses menguji dan menjelaskan secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.

Adapun tahapan dalam penelitian sejarah terdiri dari empat tahapan, sebagaimana yang diungkapkan Helius Sjamsuddin (1996: 67-187), yang terdiri dari:

1. Heuristik

Heuristik (pengumpulan sumber-sumber sejarah), dalam hal ini penulis menghimpun dan mengumpulkan sumber-sumber yang diperlukan untuk bahan penelitian. Dalam tahapan ini, penulis berusaha mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji yaitu tentang konflik antara Darul Islam dengan Darussalam. Dalam proses heuristik ini, penulis telah melakukan pra-penelitian ke daerah tempat penelitian dengan melakukan wawancara terhadap pelaku peristiwa tersebut, yang salah satunya telah diwawancarai adalah Bapak Saef Darmawan bin Yusuf Taujiri. Untuk pengumpulan studi pustaka penulis melakukan pencarian ke beberapa tempat salah satunya Perpustakaan UPI, UNPAD, YPI Al-Jawad, Perpustakaan Pemerintah Daerah (Gedung Sate), Perpustakaan Pemerintah Daerah Garut, Perpustakaan Nasional, dan lain-lain.

2. Kritik atau Analisa Sumber

Pada tahap kedua ini, penulis mencoba melakukan penilaian terhadap sumber sejarah baik isi maupun bentuknya. Dan juga menyelidiki terhadap sumber-sumber sejarah baik dari keaslian, waktu kejadian, maupun isi yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga penulis mendapatkan fakta-fakta mengenai konflik antara Darul Islam dengan Darussalam yang dapat dipercaya akan kebenarannya. Penulis melakukan kritik terhadap sumber sejarah yang dikaji melalui:

Pertama, kritik terhadap sumber tertulis, yaitu kritik terhadap kajian kepustakaan yang diperoleh penulis dalam langkah heuristik sebelumnya. *Kedua*, kritik terhadap saksi atau pelaku sejarah yang diwawancarai dengan memperhatikan beberapa faktor usia, fisik/kesehatan, serta terhadap informasi yang diberikan responden cenderung subyektif yang tinggi, atau jujur terhadap peristiwa yang dikaji tersebut.

3. Interpretasi

Interpretasi merupakan tahap ketiga dalam penelitian sejarah. Interpretasi diartikan sebagai proses penafsiran fakta-fakta sejarah dengan cara dirangkai dan dihubungkan sehingga tercipta penafsiran sumber sejarah yang relevan dengan permasalahan mengenai pertentangan antara Darul Islam dengan Darussalam.

4. Historiografi atau Penulisan Sejarah

Tahapan ini merupakan tahap akhir dalam penelitian sejarah. Historiografi adalah suatu kegiatan intelektual mengolah, menyusun dan

membahas fakta-fakta dengan menggunakan teknik dasar tulis-menulis yaitu deskripsi, narasi dan analisis sehingga menjadi satu kesatuan sejarah yang tersusun dalam bentuk karya tulis (skripsi) yang berjudul “Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia Di Kecamatan Wanaraja Garut Tahun 1948-1962 (Konflik antara Darul Islam dengan Darussalam)”.

1.4.2 Teknik Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan berbagai teknik kajian penelitian yaitu kajian studi literatur, studi dokumentasi dan wawancara. Adapun penulis dalam penelitian karya ilmiah ini akan menggunakan teknik wawancara, dengan ditambah kajian studi literatur atau studi kepustakaan, serta artikel yang dapat membantu penulis dalam memecahkan permasalahan yang dikaji, serta ditambah pula dengan kajian studi dokumentasi. Adapun teknik wawancara yang akan dipakai adalah wawancara yang sifatnya terbuka dan tertutup, hal ini dilakukan supaya dalam praktek wawancara dengan narasumber tidak kaku.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan dalam skripsi ini tersusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan beberapa pokok pikiran yang berkaitan dengan latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penulisan, metode dan teknik penelitian, serta sistematika penulisan mengenai konflik antara Darul Islam dengan Darussalam.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II ini, berisikan tentang tinjauan kepustakaan yang merupakan hasil penelaahan terhadap buku-buku sumber yang dijadikan sebagai referensi maupun acuan oleh penulis dalam skripsi ini. Tinjauan kepustakaan berisi tentang pendapat dan analisa dari beberapa penulis/pakar sejarah yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Pada bab ini penulis mengkaji beberapa buku yang terkait dengan gerakan DI/TII, serta pada bab ini penulis memposisikan tulisannya yang berbeda dengan kajian-kajian terdahulu, yang katakanlah serupa dengan permasalahan yang diambil penulis.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini, akan di bahas langkah-langkah metode dan teknik penelitian yang penulis gunakan dalam mencari sumber-sumber, cara pengolahan sumber serta analisis dan cara penulisan mengenai masalah konflik antara Darul Islam dengan Darussalam.

BAB IV. LAHIR DAN PERKEMBANGAN DI/TII S.M KARTOSUWIRYO DAN DARUSSALAM TAHUN 1948-1962

Pada bab ini, penulis menyajikan sebuah paparan tentang lahir dan perkembangan DI/TII dan Darussalam tahun 1948-1962 di Kecamatan Wanaraja Garut, serta kondisi umum bangsa Indonesia pasca kemerdekaan (1945-1948), situasi kondisi masyarakat Wanaraja sendiri mulai dari kondisi geografis, sosial-politik, dan kehidupan pendidikan dan agama periode tahun 1948-1962. Dan yang utama pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang pertikaian antara

Darul Islam dengan Darussalam, sebagai jawaban terhadap salah satu rumusan pertanyaan penelitian.

BAB V. PERBEDAAN DAN KONFLIK ANTARA DI/TII S.M KARTOSUWIRYO DENGAN DARUSSALAM TAHUN 1948-1962

Pada bab ini penulis menyajikan sebuah paparan mengenai perbedaan dan konflik antara DI/TII dengan Darussalam tahun 1948-1962 di Kecamatan Wanaraja Garut. Paparan tersebut didalamnya disertai mengenai perbedaan pandangan politik antara Kartosuwiryo dengan Yusuf Taujiri antara lain pandangan mengenai Persetujuan Renville dan pendirian Negara Islam, lalu kejelasan mengenai profil hidup dari kedua tokoh tersebut mulai dari latar belakang keluarga, pendidikan, agama, sosial dan politik. Dan yang terakhir membahas mengenai jalannya peristiwa itu sendiri selama kurun waktu 1948-1962.

BAB VI. KESIMPULAN

Pada bab ini, akan dijelaskan beberapa kesimpulan yang dapat di tarik dari pembahasan, dan merupakan jawaban terhadap masalah secara keseluruhan setelah pengkajian terhadap bab sebelumnya yaitu bab IV dan bab V.

